

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang bersifat nasional bertujuan untuk memberikan peningkatan kepada segala aspek seperti aspek bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta suatu jalannya pengembangan segala metode penyelenggaraan Negara untuk mendapatkan sasaran nasional yang ingin dicapai. Pembangunan yang bersifat nasional di negara Indonesia merupakan suatu upaya pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pelaksanaan dalam pembangunan menyangkut aspek atau faktor pada kehidupan bangsa, yaitu faktor politik, ekonomi, sosial maupun budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan, dalam rangka meningkatkan kemampuan nasional secara sistematis, secara keseluruhan, terarah, memiliki tahapan dan bersifat berkelanjutan. Dalam hal ini agar dapat menciptakan keadaan yang setara dan sejajar dengan kelompok lain yang lebih maju.

Pemerataan pembangunan nasional merupakan prioritas utama dari pemerintah pusat dan daerah untuk dapat memajukan dan mengembangkan suatu daerah di seluruh Indonesia. Masih terdapat kesenjangan pembangunan yang dimiliki oleh beberapa daerah, sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan untuk memperbaiki faktor-faktor kunci yang sudah ada. Maka dari itu, pembangunan yang ada nasional merupakan cermin penting untuk memberikan kemajuan pada suatu kesejahteraan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari saja masyarakat banyak beraktivitas dan membutuhkan akses

infrastruktur dalam menjalankan kehidupannya. Selain itu, untuk membangun ekonomi suatu masyarakat bangsa dan negara perlunya perencanaan pengoptimalan objek dan subjek dalam pembangunan yang bersifat berkelanjutan.

Pada dasarnya pembangunan nasional yang ada di Indonesia itu belum sepenuhnya merata. Banyak sekali daerah-daerah perkotaan dan daerah terpencil yang masih belum maksimal dari aspek infrastruktur dan aspek ekonomi yang dirancang dengan cukup matang. Ada beberapa pembangunan-pembangunan nasional yang direncanakan pemerintah pusat namun masih gagal seperti infrastruktur dibidang perhubungan laut dan proyek perumahan rakyat. Ini salah satu contoh pembangunan nasional yang seharusnya dapat menunjang kemajuan suatu negara namun gagal atau hanya berjalan 50% diakibatkan oleh kendala-kendala maupun perhitungan dalam perencanaan yang kurang matang.

Sedangkan pemerintah daerah memiliki hak untuk menyelenggarakan urusan yang ada di pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dimilikinya. Pemerintah di suatu daerah harus mampu untuk membuat perencanaan, perumusan, pelaksanaan serta suatu evaluasi dalam sebuah kebijakan maupun program pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat tersebut. Selain itu, pemerintah memiliki hak untuk mampu memajukan daerah yang dimilikinya. Faktor pendorong kemajuan yang ada di daerah adalah pembangunan yang bersifat fisik maupun dari sektor sumber daya manusia. Salah satu pembangunan yang banyak dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun daerah agar mengalami kemajuan yang sangat pesat. Masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan perlu penunjang pelayanan publik yang bersifat memadai. Apabila suatu daerah memiliki kebijakan terkait dengan pembangunan yang mampu menunjang

dan memberi kemudahan dari aspek ekonomi, aspek sosial serta aspek-aspek lainnya.

Pembangunan diartikan sebagai usaha yang dilakukan berupa kemajuan yang terencana dan diterapkan oleh bangsa dan negara menuju suatu modernitas dalam rangka pembangunan bangsa. Dalam pembangunan ekonomi daerah dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan bagi seluruh rakyat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan bagian masyarakat. Untuk mencapai esensi arah pembangunan ekonomi itu, pembangunan harus didasarkan pada keunikan daerah sendiri agar dapat untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia, peran serta pemerintah daerah maupun masyarakat diperlukan untuk membentuk dan membangun pertumbuhan ekonomi di daerah. Pasar merupakan salah satu infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pasar adalah salah satu sistem, institusi, proses yang memelihara hubungan sosial dan tempat suatu bisnis penyedia barang, jasa, dan tenaga kerja kepada masyarakat luas dengan upah berupa uang.

Pembangunan tentu selalu memperhatikan segi keefektifan dari pembangunan tersebut, dimana pemerintah seringkali menggunakan cara merevitalisasi untuk dapat memaksimalkan suatu objek pembangunan agar dapat mengefesiensikan anggaran. Dengan adanya revitalisasi suatu objek diharapkan mampu membangkitkan kembali dengan adanya perkembangan ekonomi pedagang yang lebih baik lagi kedepannya.

Menurut Fitriana (2020) revitalisasi merupakan proses atau cara yang dilakukan dengan tindakan untuk menghidupkan atau menggerakkan kembali sesuatu yang dahulunya diberdayakan maka dengan adanya revitalisasi membuat

sesuatu atau suatu tindakan untuk menjadi suatu hal penting, hal yang sangat penting itu begitu esensial bagi kehidupan manusia.

Kawasan Kepulauan Riau mempunyai beberapa kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan 2 kota yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. salah satu daerah paling maju dengan potensi berupa sumber daya manusia dan alam yaitu provinsi Kepulauan Riau. Seperti yang kita lihat, ada berbagai sumber daya alam yang mampu dijadikan sebagai suatu sumber pendapatan bagi masyarakat. Salah satunya adalah kota yang memiliki masyarakat masih bergantung pada sektor perairan, karena kawasan ini merupakan salah satu tempat penghasil ikan dan memiliki potensi yang sangat besar.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten yang telah ditetapkan sebagai daerah otonom selama 22 tahun. Selama ini, banyak pekerjaan pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan di berbagai bidang. Namun, beberapa perkembangan yang dianggap kurang berhasil karena perencanaan dan pengukuran tidak terukur dan diperkirakan secara cermat. Pembangunan daerah yang di rencanakan tidak bersifat berkelanjutan membuat ada beberapa yang hanya asal berdiri namun tidak memikirkan konsep keberhasilan suatu pembangunan itu kedepannya. Padahal melihat kondisi daerah kabupaten sendiri apabila pemerintah daerah mampu menerapkan pembangunan yang bersifat berkelanjutan maka akan dapat menciptakan peluang dari segi pengembangan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Potensi yang dimiliki seperti ada di Pulau Kundur banyak sekali masyarakat yang dominan memiliki mata pencarian dari nelayan dan petani. Dengan perputaran dunia perekonomian yang sangat pesat pada zaman sekarang ini

maka perlunya berupa fasilitas pembangunan untuk meningkatkan akses pertumbuhan masyarakat Pulau Kundur serta pemerintah daerah Kabupaten Karimun.

Dengan kondisi dunia setelah dilanda bencana virus Covid-19, terjadi permasalahan ekonomi yang dialami dengan semua negara didunia. Hal tersebut juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berada di daerah Karimun, sehingga pemerintah daerah harus jeli dalam menganalisis potensi daerah untuk dapat menumbuhkan ekonomi daerah. Dengan pemerintah daerah melakukan revitalisasi Pasar Sawang, jelas diharapkan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar dan mampu menjadikan sumber pendapatan potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Karimun. Pengelolaan menjadi faktor penentu dalam memaksimalkan usaha pemerintah daerah untuk menjadikan pasar sebagai suatu tempat yang memiliki sumber Pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat besar di daerah tersebut.

Menurut Arief (2009) mendefinisikan tata kelola (*governance*) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang tujuan utamanya adalah mengelola resiko yang signifikan untuk mencapai tujuan bisnisnya melalui pengamatan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Menurut Fadillah & Noor (2020) berdasarkan manajemen pengelolaannya, pasar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah yang kemudian juga dikelola oleh negara, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan adanya kerjasama yang

dilakukan kepada pihak swasta dengan berbagai jenis bentuk usaha seperti toko, kios, dan tenda yang dimiliki oleh mereka dan mampu dikelola oleh para pedagang kecil maupun menengah, serta swadaya masyarakat ataupun koperasi dengan bentuk usaha yang berskala kecil, menengah tetapi usahanya berskala kecil, memiliki modal kecil namun proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Pengelolaan pasar sangat dipengaruhi terhadap penataan pasar tersebut, demi kenyamanan dan keamanan pembeli.

Menurut Fahmi (2021) penataan dan pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern diharapkan dapat melindungi dan meningkatkan peluang pasar tradisional dalam menghadapi perkembangan usaha perdagangan eceran yang berbentuk kecil dan menengah serta usaha perdagangan modern dalam bentuk skala besar yang semakin meningkat.

Salah satu yang menjadi perhatian yang berkaitan dengan pengelolaan pasar. Pasar tradisional atau pasar perbelanjaan merupakan pusat keramaian yang ada di beberapa titik dalam Pulau Kundur yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk bertransaksi jual beli setiap harinya. pasar yang berbentuk tradisional merupakan sebuah infrastruktur yang berbentuk umum dan terjadinya proses transaksi didalamnya yang dimungkinkan adanya proses tawar menawar.

Di pasar tradisional orang yang datang ke pasar tidak selalu menjadi pembeli, akan tetapi, mereka dapat menjadi seorang penjual, bahkan siapa saja bisa menjual barang miliknya di pasar tersebut. Pasar tradisional merupakan tempat berputarnya roda perekonomian yang sangat penting bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Banyak orang yang menggantungkan mata pencahariannya pada pasar tradisional

menjadi pedagang pasar tradisional, pekerjaan alternatif di tengah tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Pembangunan pasar yang ada di pulau Kundur tidak semuanya berjalan secara maksimal. Ada beberapa yang berdiri namun tidak lancar akibat sedikitnya pembeli yang membuat perputaran ekonomi yang cukup sulit. Pasar Sawang merupakan infrastruktur utama yang dimiliki oleh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Pasar Sawang berdiri pada tahun 2012.

Pasar Sawang sebelum direvitalisasi memiliki lapak sebanyak 15 lapak yang dikelola oleh masyarakat dan pedagang, dimana setiap pedagang dikenai biaya Rp. 7.000 perharinya yang kemudian dipergunakan sebagai uang kebersihan dan uang renovasi ringan pasar. Pasar tersebut juga dimanfaatkan sebagai tempat bongkar hasil tangkapan nelayan untuk kemudian dijual kepada pedagang yang berada di luar pasar, dikarenakan lokasi pasar yang tidak jauh dari pantai.

Pelaksanaan revitalisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karimun, memberi wajah baru kepada Pasar Sawang. Kondisi pasar yang awalnya sangat kumuh dan seakan tidak terurus, menjadi bersih dan nyaman dengan banyaknya perubahan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karimun. Penambahan fasilitas seperti toilet, lahan parkir, lapak baru dan kios diharapkan mampu memberikan kenyamanan tersendiri kepada pengunjung pasar yang ingin berbelanja. Pelaksanaan revitalisasi tersebut menggunakan dana yang di alokasikan oleh pemerintah pada tahun 2019 senilai Rp. 1,4 miliar. Setelah direvitalisasi Pasar Sawang diresmikan oleh bupati Karimun pada hari senin tanggal 13 Januari 2022.

Tabel 1.1 Sebelum Dan Sesudah Revitalisasi

No	Fasilitas	Sebelum	Sesudah
1	Lapak	15 unit	32 unit
2	Kios	-	7 unit
3	Toilet	-	2 unit
4	Parkir	-	1 lahan

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2022.

Pelaksanaan revitalisasi berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan awal pemerintah Kabupaten Karimun, namun kesesuaian tersebut hanya mengacu kepada pembangunan fisik yang telah digambarkan penulis. Kondisi pasar yang sebelum revitalisasi memiliki banyak pengunjung dan setelah berjalan satu bulan pasca diresmikan Pasar Sawang tersebut, tidak membuat para penjual yang ada dipasar itu menjadi berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah sebulan diresmikan para penjual mulai mengalami degradasi pendapatan akibat sedikit pembeli yang datang ke Pasar Sawang itu. Selain itu, banyak pembeli yang membeli bahan pokok melalui kedai runcit yang ada di tepi jalan atau di dekat kawasan pembeli tinggal.

Hal ini menjadi salah satu aspek juga yang membuat para pedagang harus mengalami kesepian pembeli, dengan adanya hal tersebut banyak pedagang yang awalnya datang dengan 5 atau 10 kg sayur ke lapak dipagi harinya. Namun di saat pulang kerumah pun dia membawa sayur dengan berat yang sama karena tidak adanya pembeli yang mau datang ke pasar tersebut. Selain itu, akibat sepi lapak penjual membuat banyak pedagang yang awal mulanya saat peresmian terisi semua yaitu sebanyak 32 lapak semakin lama mulai tidak berjualan disitu akibat kendala-kendala yang ada.

Gambar 1.1 Kondisi Pasar Terkini



Sumber: Olahan Penulis Tahun 2022

Berdasarkan penjelasan dari gambar di atas maka terjadinya kekosongan dalam aktivitas jual beli. Pasca revitalisasi pengelolaan Pasar Sawang diambil sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Karimun, yang dalam pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah Bumi Berazam Jaya. Selaku penanggungjawab, Perusahaan Umum Daerah Bumi Berazam Jaya harus mengawasi terkait pengelolaan dan segala aktivitas ekonomi yang ada di Pasar Sawang. Berkaitan dengan hal itu dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bumi Berazam Jaya bahwasannya di pasal 1 poin nomor 5 menjelaskan tentang Perusahaan Umum Daerah Bumi Berazam Jaya yang selanjutnya disebut dengan Perumda adalah badan usaha milik daerah dengan jenis usaha dibidang pengelolaan pasar dan jasa lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak terbagi atas saham. Selain itu, di pasal 4 point a menjelaskan bahwa maksud dari pendirian Perumda adalah membangun, menyelenggarakan dan mengelola pasar sebagai pusat perdagangan. Hal itu jelas selaras dengan masalah penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan Pasar Sawang yang ada di Kecamatan Kundur Barat. Masalah

tersebut pastinya memiliki efek yang cukup besar terhadap sektor ekonomi yang ada di daerah. Karena sesuai dengan tujuan pendirian Perumda yang menjelaskan bahwa Perumda harus mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Hal tersebut seharusnya menjadi suatu tanggung jawab yang dimiliki Perumda dalam mengelola pasar termasuk Pasar Sawang yang ada di Kelurahan Sawang Kabupaten Karimun.

Penggunaan anggaran yang sangat besar, tentunya pemerintah harus dapat dengan efektif memanfaatkan Pasar Sawang sebagai salah satu objek untuk dapat meningkatkan ekonomi. Namun, kenyataan dilapangan pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan umum daerah (Perumda) belum berjalan secara baik dan maksimal. Maka dari itu, dengan masih adanya masalah penulis mencoba meneliti terkait tata kelola Pasar Sawang oleh Perusahaan Umum Daerah Bumi Berazam Jaya Kabupaten Karimun.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tata kelola Pasar Sawang Oleh Perusahaan Umum Daerah Bumi Berazam Jaya Kabupaten Karimun?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana tata kelola Pasar Sawang oleh perusahaan umum daerah bumi berazam jaya Kabupaten Karimun.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan dan menjadi acuan dalam penelitian berikutnya dengan permasalahan yang sama serta menjadi referensi pustaka bagi penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dilihat dari kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Karimun terkait tata kelola Pasar Sawang oleh Perusahaan Umum Daerah Bumi Berazam Jaya Kabupaten Karimun.

